

JUDUL : ANALISIS HUKUM TERHADAP  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
APARTMENT GDL DI SURABAYA

Nama : Devina Michaela Laksmono

Jurusan/ Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Pembimbing 1 : Suhariwanto, S.H., M.Hum.

Pembimbing 2 : Nabbilah Amir, S.H., M.H.

ABSTRAK

Dewasa ini tidak jarang ditemukan adanya pembangunan bangunan bertingkat tinggi atau apartemen yang menimbulkan kerugian bagi warga sekitar lokasi pembangunannya, sebagai contoh pembangunan apartemen GDL yang telah merugikan hingga 200 rumah disekitar lokasi proyeknya dengan hancurnya dinding-dinding rumah tersebut. Fenomena ini tidak hanya merugikan warga sekitar secara materiil namun juga berujung pada kerugian imateriil. Penulisan jurnal ilmiah ini ditujukan guna mengetahui bagaimanakah ketentuan-ketentuan hukum mengatur mengenai proses pelaksanaan pendirian bangunan rumah susun atau apartemen dan bagaimanakah sanksi administrasi diberlakukan terkait pembangunan yang merugikan warga sekitar. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Ketentuan-ketentuan hukum mengenai struktur pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan apartemen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mewajibkan setiap pelaksanaan pembangunan bangunan gedung wajib memperhatikan agar keputusan dari pembangunan yang berlangsung tidak membahayakan dan merugikan kepentingan umum. 2. Sanksi administrasi yang diberlakukan atas sebuah proyek pembangunan yang merugikan kepentingan umum warga sekitar dalam skala luas ialah berupa penarikan kembali keputusan yang telah ditetapkan, dalam hal ini izin mendirikan bangunan terkait.

Kata kunci: apartemen, IMB, KTUN, pemerintah

TITLE : ANALISIS HUKUM TERHADAP  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
APARTMENT GDL DI SURABAYA

Name : Devina Michaela Laksmono

Dicipline/ Study Programme : Law/Legal Studies

Contributor 1 : Suhariwanto, S.H., M.Hum.

Contributor 2 : Nabbilah Amir, S.H., M.H.

#### ABSTRACT

*As of recently it is not uncommon to find the construction of high-rise buildings or apartments that cause harm to residents around the construction site, for example the construction of the GDL apartment which has harmed up to 200 houses around the project site by destroying the walls of the house. This phenomenon not only harms local residents materially but also leads to immaterial losses. Writing this scientific journal is intended to find out how the legal provisions regulate the process of implementing the construction of flats or apartments and how administrative sanctions are applied regarding developments that harm local residents. By using the normative legal research method, it is concluded that: 1. The legal provisions regarding the structure of the implementation of the implementation of apartment development as regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, requires that every building construction implementation must pay attention to the decision of the development that take place without endangering and harming the public interest. 2. The administrative sanction imposed on a development project that is detrimental to the public interest of local residents on a broad scale is in the form of revoking a predetermined decision, in this case the permit to construct the related building.*

*Keywords: apartment, building permit, regulation, government*